

ABSTRAK

Judul skripsi adalah: Studi Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1).Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon. 2).Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 3).Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. 4).Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah 1).Untuk Mengetahui alasan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 2). Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon. 3).Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. 4).Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah mengabulkan, permohonan tidak dapat diterima, menolak dan akibat hukum. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap ketiga kasus yang di teliti maka 1).Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon yaitu Permohonan Pemohon dianggap beralasan menurut hukum untuk Sebagian oleh Mahkamah, 2).Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima yaitu pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan, 3).Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon yaitu Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya perihal termohon telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dengan cara melakukan pencermatan dan pendistribusian terhadap daftar. 4) Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu a). Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Boven Digoel, b) Keputusan KPU tetap berlaku, c) Tidak ada perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah bagi Peserta Pemilihan Kepala Daerah agar diharapkan mengedepankan etika demokrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga sengketa yang diajukan benar-benar didasarkan pada pelanggaran yang substansial dan berpengaruh terhadap hasil pemilihan, bukan semata-mata karena ketidakpuasan terhadap hasil akhir dan juga bagi lembaga konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi diharapkan semakin memperjelas kriteria mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat menjadi dasar dikabulkannya permohonan. Kejelasan ini diperlukan agar para peserta pemilihan memahami secara objektif batasan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan layak untuk dikoreksi melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

The title of the thesis is: Comparative Study of Constitutional Court Decisions in Regional Head Election Disputes. The Problem Formulations studied by the Author are 1). The Constitutional Court Judge granted the Petitioner's Petition. 2). The Constitutional Court Judge declared the Petitioner's Petition unacceptable. 3). The Constitutional Court Judge rejected the petitioner's petition. 4). The legal consequences of the Constitutional Court's decision on the results of the election of regional heads and deputy regional heads. The objectives that the author wants to study are 1). To find out the reasons why the Constitutional Court judge declared the Petitioner's Petition unacceptable. 2). To find out the reasons why the Constitutional Court judge granted the Petitioner's Petition. 3). To find out the reasons why the Constitutional Court judge rejected the petitioner's petition. 4). To find out the legal consequences of the Constitutional Court's decision on the results of the election of regional heads and deputy regional heads. The nature of the research is descriptive and the type of research that the author uses is normative research. The independent variables in this study are granting, the petition cannot be accepted, rejecting and legal consequences. The dependent variable in this study is the Constitutional Court's Decision in the Regional Head Election Dispute. Based on the results of the author's research on the three cases studied, 1). The Constitutional Court Judge granted the Petitioner's Application, namely the Petitioner's Application was considered legally justified in part by the Court, 2). The Constitutional Court Judge stated that the Petitioner's Application was unacceptable, namely the applicant did not have the legal standing to submit an application according to the provisions of Article 158 of Law 10/2016 as a formal requirement in submitting an application, 3). The Constitutional Court Judge rejected the applicant's application, namely the applicant was unable to prove his argument regarding the respondent having taken sides with Candidate Pair Number 1 systematically by conducting scrutiny and distribution of the list. 4) What are the legal consequences of the Constitutional Court's decision on the results of the election of regional heads and deputy regional heads, namely a). The Constitutional Court annulled the decision of the Boven Digoel Regency KPU Number 433 of 2024 concerning the determination of the results of the Boven Digoel Pilkada, b) The KPU's decision remains in effect, c) There is no order for a Re-Vote (PSU). The author's suggestion regarding this writing is for Regional Head Election Participants to prioritize democratic ethics and compliance with laws and regulations, so that the disputes submitted are truly based on substantial violations and influence the election results, not merely because of dissatisfaction with the final results and also for the constitutional institution, namely the Constitutional Court, it is hoped that the criteria regarding structured, systematic, and massive (TSM) violations that can be the basis for granting a petition are further clarified. This clarity is needed so that election participants objectively understand the limits of violations that can affect the election results and are worthy of correction through a Constitutional Court decision.

Keywords: Dispute over Regional Head Election Results

